

LAKIP
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM
Jl. Sengkawit Raya Komplek Pasar Induk Tanjung Selor Kode Pos 77212
TANJUNG SELOR

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023, yang nantinya akan dijadikan bahan pendukung dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP) Provinsi Kalimantan Utara. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan.

Tanjung Selor, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara



Hi. Hasriyahi, SH, MM
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 197307172003082008

Ringkasan Eksekutif

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 9 Orang dengan Pendidikan S2, 35 Orang S1, 3 Orang D3, 1 Orang SLTA dan didukung oleh 12 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

A. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Dalam penentuan isu strategis perlu dilakukannya identifikasi terhadap permasalahan yang ada di Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berikut permasalahan yang terdapat di bidang :

Table Pemetaan masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat	1. Belum optimalnya peran koperasi	1. Cukup tingginya jumlah koperasi tidak aktif. 2. Masih rendahnya pemahaman tentang koperasi.
		2. Belum berkembang nya usaha ekonomi	1. Keterbatasan permodalan. 2. Masih rendahnya strategi pemasaran.

			3. Belum optimalnya perlindungan terhadap pelaksana koperasi dan pelaku UKM.
2	Tingginya ketergantungan terhadap suplai kebutuhan pokok masyarakat dan tingkat konsumsi produk dari luar wilayah	1. Tingginya harga kebutuhan pokok masyarakat	1. Rantai distribusi barang sangat panjang. 2. Mahalnya ongkos angkut barang. 3. HET tidak dapat dijadikan acuan. 4. Jaringan infrastruktur belum terbangun dengan baik dan merata.
		2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Minimnya informasi masyarakat tentang undang-undang perlindungan konsumen terhadap peredaran barang dan/atau jasa serta kegiatan perdagangan
3	rendahnya neraca perdagangan ekspor	Menurunnya tren nilai ekspor bersih.	1. Terdapat pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi standar ekspor. 2. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur ekspor dan impor 3. Produk unggulan Kalimantan Utara yang masih kurang dikenal di pasar internasional
4	Masih rendahnya kemampuan industri terhadap kontribusi perekonomian daerah	Belum optimalnya pengembangan sektor industri	1. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara belum menyusun RPIK 2. Belum termanfaatkannya sarana industri yang telah dibangun 3. Belum optimalnya sinkronisasi antara Organisasi/Lembaga/ Masyarakat dalam mendukung Program Pengembangan Industri 4. Rendahnya pemahaman stakeholder terhadap proses penerbitan izin industri

			5. Rendahnya informasi terkait industri di Provinsi Kalimantan Utara
--	--	--	--

B. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Capaian kinerja yang ada pada tahun 2023 adalah gambaran dari keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian perjanjian kinerja yang telah di perjabikan antara Kepala Dinas dan Kepala Daerah, dan berikut merupakan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2023

Tabel Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase capaian kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	71%	73%	102%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,99 %	-9%	-5%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%	23%	462%
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	2,1 %	-13,30%	-619%

5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	2,61	100%
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	6 %	7%	78%
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	15 %	7,19%	45%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	14,41 %	-0,13%	-90%

C. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI

Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan OPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi

Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Dengan laporan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi kinerja, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat terukur dan tepat sasaran dalam sebuah pelaksanaan Program dan Kegiatan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum SKPD.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Sumber Daya Organisasi.....	2
D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
A. Strategi dan Kebijakan.....	10
B. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja.....	14
B. Analisis Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK.....	15
C. Pengungkapan Renstra yang belum dapat diukur ditahun 2023.....	18
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	37
B. Hasil Analisis Berupa Hambatan Dari Bab III Sasaran.....	38
C. Langkah-langkah yang akan dilakukan tahun berikutnya.....	40
D. Pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja Baru yang sesuai dengan renstra.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2023.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2023.....	3
Tabel 1.3 Data Pendidikan dan Golongan Pegawai per Desember 2023.....	4
Tabel 1.4 Data Pegawai Negeri Menurut Bidang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2023.....	4
Tabel 1.5 Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Per Desember 2023.....	5
Tabel 1.6 Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2023.....	5
Tabel 2.1 Strategi Kebijakan.....	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja dan Target.....	13
Tabel 3.1 Capaian Kinerja berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.....	14
Tabel 3.2 Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian Yang ada di PK.....	16
Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi.....	18
Tabel 3.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2022-2023.....	19
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra.....	21
Tabel 3.7 Analisa Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan.....	26
Tabel 4.1 Analisis Hambatan.....	38
Tabel 4.2 Hambatan dan Upaya yang dilakukan ditahun berikutnya.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Utara.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 79 dan 80 Paragraf 2 dan 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Sumberdaya Organisasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir Desember tahun 2023 memiliki jumlah pegawai Negeri Sipil Sebanyak 48 orang dan Pegawai Tidak Tetap Sebanyak 24 Orang berikut ini disajikan Jumlah pegawai

Negeri dan Tenaga kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM

Table 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2023

No.	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	5	10	15
2.	Bidang Industri	5	3	8
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	3	5	8
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	5	1	6
5.	Bidang Koperasi & UKM	7	2	9
J u m l a h		26	23	47

Berikut disajikan Jumlah pegawai Tidak Tetap sesuai dengan jenis kelamin dan masing – masing bidang.

Table 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Per Desember Tahun 2023

No.	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	11	7	18
2.	Bidang Industri	1	1	2
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	-	1	2
4	Bidang Perdagangan	1	-	-

	Luar Negeri			
5.	Bidang Koperasi & UKM	1	1	2
J u m l a h		13	11	24

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 9 Orang dengan Pendidikan S2, 35 Orang S1, 3 Orang D3, 1 Orang SLTA dan didukung oleh 12 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Berikut disajikan Tabel Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil per Desember 2023.

Tabel 1.3 Data Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan Pegawai per Desember 2023

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
6	37	4	-	26	23	9	36	4	3	-	-	

Berikut tabel Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan dan jenis kelamin di Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM

Table 1.4. Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Bidang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2023

No.	Bagian / Bidang	P E N D I D I K A N												Jumlah	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat					1	1	-	3	3	5	1	1	5	10
2.	Bidang Industri					-	-	-	-	5	2	-	-	5	3
3.	Bidang Perdagangan Dalam Negeri					-	-	-	-	3	3	-	2	3	5
4	Bidang					-	-	-	-	4	1	1	1	5	2

	Perdagangan Luar Negeri														
5.	Bidang Koperasi & UKM					-	-	-	-	5	2	2	-	7	2
J U M L A H														25	22

Berikut ini disajikan tabel Tenaga Kontrak menurut pendidikan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 1.5 Tenaga Kontrak menurut pendidikan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Per Desember 2023

Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai i Kontrak
L	P	S2	S1	SM/D3	SMA / SMK	SLTP	SD	
13	11	0	12	1	11	0	0	24

Berikut disajikan tabel Pendidikan Pegawai Kontrak menurut jenis kelamin

Tabel 1.6. Data Pendidikan Pegawai Tidak Tetap Menurut Jenis Kelamin Disperindagkop & UKM Prov. Kaltara Per Desember 2023

No.	Bagian / Bidang	P E N D I D I K A N												Jumlah	
		SD		SLTP		SMA/ SMK		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	-	-	10	2	-	-	2	5	-	-	12	7
2.	Bidang Industri	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
3.	Bidang Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0

	Dalam Negeri														
4.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4.	Bidang Koperasi & UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
J u m l a h														15	9

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Isu–isu Strategis Selama rentang waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- 1) Rendahnya pertumbuhan sektor industri
- 2) Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan
- 3) Penurunan neraca perdagangan ekspor barang di Kalimantan Utara
- 4) Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk
- 5) Rendahnya kemampuan para pelaku UMKM/Pelaku Usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang berbasis sumber daya lokal dan dapat bersaing
- 6) Belum optimalnya pelaku UMKM dalam mengakses KUR
- 7) Rendahnya Koperasi Sehat di Kalimantan Utara

E. Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara terdiri dari 4 (Empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan mencakup : Gambaran Umum SKPD, Tugas dan Fungsi, Sumberdaya Organisasi, Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi dan Sistematika penyajian Laporan Kinerja.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini mencakup Perencanaan Kinerja mencakup : Strategi dan Kebijakan Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini mencakup : Akuntabilitas kinerja, capaian-capaian di perjanjian Kinerja, analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang ada di perjanjian kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan apapun kegagalan pernyataan kinerja;

Bab IV : Penutup

Bab ini mencakup : Kesimpulan, hasil analisis berupa hambatan dari bab III sasaran, langkah-langkah yang dilakukan ditahun berikutnya untuk mengatasi hambatan, pengungkapan Renstra baru dengan menyusun perjanjian kinerja baru yang sesuai dengan renstra;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Rencana Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Table 2.1. Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera			
Misi 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Bidang Industri	
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata	1. Meningkatkan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Mengoptimalkan penyusunan RPIK di Kabupaten Kota 2. Memanfaatkan sarana industrin yang terbangun
		2. Mengoptimalkan Pengendalian Izin Usaha Industri	1. Mengoptimalkan sinkronisasi antara Organisasi/Lembaga/ Masyarakat dalam mendukung Program Pengembangan Industri 2. Meningkatkan Rendahnya pemahaman stakeholder terhadap proses

			penerbitan izin industri
		3. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Mengoptimalkan informasi terkait industri di Provinsi Kalimantan Utara
		Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
		1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Mengoptimalkan pembangunan jaringan infrastruktur dengan baik dan merata
		2. Menjaga Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Mempertahankan Subsidi Ongkos Angkut Barang 2. Memantau pelaksanaan distribusi barang
		3. Meningkatkan Perlindungan Konsumen	1. Melakukan pengawasan barang beredar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan dalam pemberian informasi ke masyarakat terkait perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen
		4. Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Melaksanakan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri
		Bidang Perdagangan Luar Negeri	
		1. Mengoptimalkan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Ekspor	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur ekspor dan impor

		2. Mengembangkan Ekspor	1. Melakukan pelatihan kepada pelaku ekspor agar dapat memenuhi standar ekspor 2. Meningkatkan promosi dan kualitas Produk unggulan Kalimantan Utara yang masih kurang dikenal di pasar internasional
Misi 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Bidang Koperasi dan UKM	
Mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Meningkatkan pertumbuhan koperasi sehat 2. Meningkatkan pemahaman tentang koperasi 3. Mengoptimalkan perlindungan terhadap pelaku UKM
		2. Meningkatkan dan Mengembangkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Meningkatkan strategi pemasaran 2. Memperkuat permodalan 3. Mengoptimalkan perlindungan terhadap pelaku UKM

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak dimana pihak pertama adalah Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak ke dua adalah Gubernur Kalimantan Utara Dr.(H.C). H. Zainal. Paliwang, M.Hum sebagai acuan kerja Dinas Perindagkop dan UKM pada Tahun Anggaran 2023 dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Table 2.2 Perjanian Kinerja dan target Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi aktif	71%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,99 %
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	2,1 %
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	6 %
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	15 %
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	14,41 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian – capaian di perjanjian kinerja

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mengukur pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, pada tahun 2023 telah dilaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya mencapai perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan. Capaian kinerja pada Dinas Perindagkop dan UKM pada tahun 2023 sesuai dengan Sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Disperindagkop dan UKM Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase capaian kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	71%	73%	102%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,99 %	-9%	-5%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%	23%	462%

4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	2,1 %	-13,30%	-619%
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	2,61	100%
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	6 %	7%	78%
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	15 %	7,19%	45%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	14,41 %	-0,13%	-90%

B. Analisis Hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK

Bagian ini akan menguraikan analisis hambatan dan upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di PK, dengan melakukan analisa terhadap permasalahan – permasalahan yang dapat menghambat pencapaian, kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana Perjanjian Kinerja 2023 antara Kepala Daerah dan Kepala OPD, dan hambatan serta upaya yang dilakukan terkait penapaian Perjanjian Kinerja terangkum dalam table berikut :

Tabel 3.2
Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan koperasi sehat	Pertumbuhan koperasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan peningkatan kulalitas dalam pengelolaan koperasi, Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementriaan Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat	Melakukan pengawasan kepada koperasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus dan anggota koperasi

	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Masih terdapat UMKM yang belum mengetahui proses untuk mengakses KUR yang ada diperbankan, tidak semua pelaku UMKM paham teknologi sehingga kegiatan sosialisasi secara daring cukup menyulitkan dan informasi melalui media sosial tidak dapat diakses secara maksimal untuk UMKM yang mengakses KUR mengalami penurunan sebesar 1.569	Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait dengan adanya KUR yang dapat diakses sebagai penguat permodalan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan mengoptimalkan peran dari pendamping UMKM yang ada di Kabupaten dan Kota.
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Adanya perbedaan pendataan terkait dengan kategori usaha mikro yang menyebabkan perubahan data dan perlunya melakukan pendataan ulang sesuai dengan klasifikasi yang telah disepakati oleh kementerian Koperasi dan UMKM	Dinas perindagkop telah melakukan upaya memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM dan melakukan perbaikan data pada UMKM
2	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Masih banyak Komoditi ekspor kaltara yang berbentuk mentah dan belum berbentuk produk siap pakai, dan belum terbukanya akses pasar internasional bagi pelaku UKM maupun IKM dikarenakan barang yang belum memenuhi standarisasi ekspor pada Negara tujuan.	Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai, dan melakukan peningkatan citra produk UKM dan IKM agar dapat memenuhi standar ekspor negara tujuan.

3	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Masih terdapat ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bahan Pokok di Kalimantan Utara terutama saat menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional Dikarenakan barang kebutuhan pokok di Kalimantan Utara masih dikirimkan dari luar Provinsi Kalimantan Utara.	Mengadakan kegiatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok dan melakukan operasi pasar murah untuk meminimalisir kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok terutama menjelang pelaksanaan perayaan Hari besar keagamaan nasional
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Masih didapati pelaku usaha yang menjual produk dari luar negeri tanpa syarat dan ketentuan jaminan mutu produk negara Indonesia	Melakukan pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur seperti kepolisian dan TNI untuk mencegah peredaran produk ilegal dari luar negeri
	Meningkatnya pasar produk lokal	Masih terdapat produk yang kalah bersaing dengan produk luar Provinsi Kalimantan Utara hal ini dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM masih belum memenuhi standar jual seperti kemasan produk dan jaminan keamanan produk seperti label BPOM, label halal sehingga sulit untuk dipasarkan dan menarik minat konsumen. Dan masih kurangnya promosi dan kesempatan kepada pelaku UMKM yang memiliki produk yang telah memenuhi syarat	Melakukan Sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk dapat membantu menjual produk lokal yang telah memenuhi standar ketentuan jual

		ketentuan jual.	
4	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Belum Optimalnya pengaplikasian rencana dokumen pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/kota, serta belum maksimalnya pengembangan hilirisasi industri berbahan dasar lokal	Melakukan review atas dokumen perencanaan pembangunan industri serta melakukan peningkatan kapastias kepada pelaku Industri kecil dalam kualitas produk dan produksi produk.

C. Pengungkapan Renstra Yang Belum Dapat Diukur Di Tahun 2023

Dalam Pengungkapan renstra baru yang belum dapat diukur di tahun 2023, tidak terdapat indikator program dan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak memiliki relevansi, antara indikator dan satuan yang terdapat dalam Program maupun Kegiatan yang terdapat dalam renstra 2021 – 2026.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan target dalam pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan dapat dilihat pula perbandingan antara Target yang telah ditetapkan dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai antara lain adalah;

Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase capaian kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	71%	73%	102%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,99 %	-9%	-5%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%	23%	462%
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	2,1 %	13,30%	-619%
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	2,61%	100%
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	6 %	7%	78%

7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	15 %	7,19%	45%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	14,41 %	-0,13%	-90%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilakukan untuk melihat perbandingan capaian kinerja pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, capaian kinerja 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.5.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2022-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	73%	73%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	11,94%	-9%

3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	-42%	23%
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	57,70%	-13,30%
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3,25%	2,61
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	6,70%	7%
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	46,18%	7,19%
8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	26%	-0,13%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara realialisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra antara lain seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	71%	73%	73%
2.	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,99 %	-9%	2%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%	23%	9,5%
4.	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	2,1 %	-13,30%	3,1%
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1	2,61%	3 ± 1
6.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	6 %	7%	4%
7.	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	15 %	7,19%	30%

8.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	14,41 %	-0,13%	17,74%
----	---	---	---------	--------	--------

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan tidak terdapat standar nasional pada urusan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, maka ditemui beberapa Penyebab Keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan capaian kinerja di tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

Keberhasilan :

- a. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Koperasi dan UKM melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi sehat dengan memberikan pengawasan dan pelatihan kepada pelaku koperasi, serta memberikan sosialisasi kepada UMKM terkait KUR yang tersedia di perbankan.
- b. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha calon eksportir berupa promosi dagang internasional untuk membuka peluang kepada pelaku usaha untuk melakukan ekspor produk.
- c. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Industri melakukan upaya percepatan pembangunan industri terkait dengan penerapan dokumen RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) dan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) di Provinsi

Kalimantan Utara serta megnoptimalkan hilirisasi produk industri berbahan dasar lokal Kalimantan Utara.

- d. Dinas Perindagkop dan UKM melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri dapat melaksanakan Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut ke daerah perbatasan Kalimantan Utara untuk menekan harga jual yang ada di daerah perbatasan yang masuk dalam kategori terdepan, terpencil dan tertinggal, selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan pengawasan terhadap bahan pokok dan penting di Provinsi Kalimantan Utara untuk menjaga stabilitas harga daerah dan dengan adanya inovasi berupa aplikasi yang didesain dengan tujuan utama untuk memperoleh data secara real-time mengenai harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kalimantan Utara berupa Sistem Informasi Pengendalian Harga Terpadu Kalimantan Utara (SIAP SIGAP-KU).

Kegagalan :

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdapat kegagalan dalam pencapaian Sasaran Strategis OPD yang belum optimal seperti

1. Meningkatkan UMKM yang mengakses KUR
2. Meningkatkan nilai ekspor bersih Kaltara
3. Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Solusi :

Solusi yang dilakukan dalam menangani hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2023 telah dibahas pada tabel 3.2 yang membahas tentang Hambatan dan Upaya yang dilakukan terkait pencapaian yang ada di Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sampai dengan akhir Desember tahun 2023 Dinas Perindagkop dan UKM memiliki jumlah Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara didukung oleh 9 Orang dengan Pendidikan S2, 35 Orang S1, 3 Orang D3, 1 Orang SLTA dan didukung oleh 12 Orang S1, 1 Orang D3, 11 Orang SMA Tenaga Kontrak.

Dalam efisiensi penggunaan sumberdaya manusia yang ada Dinas Perindagkop dan UKM menempatkan pegawai dengan beban kerja yang cukup merata walaupun masih didapati beberapa jabatan yang belum sesuai dengan jabatannya namun keinginan untuk selalu belajar dan meningkatkan kapasitas diri pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi nilai tambah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada Tahun anggaran 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menerima Pagu Anggaran sebesar Rp. 40.379.750.839 dan pada Perubahan Anggaran pada bulan Agustus 2023 Pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi Rp. 43.073.807.124

Belanja Langsung :

a. Sekretariat

Alokasi anggaran Rp. 10.731.379.932 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.456.541.364 dengan persentase 97% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 274.838.568

b. Perindustrian

Alokasi anggaran Rp. 4.700.290.742 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.615.141.006.dengan persentase 98% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 85.149.736

c. Perdagangan Dalam Negeri

Alokasi anggaran Rp. 22.298.734.502 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.866.449.693 dengan persentase 94% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 1.432.284.809

d. Perdagangan Luar Negeri

Alokasi anggaran Rp. 981.281.065 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 970.099.104 , dengan persentase 99% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 11.181.961

e. Koperasi dan UKM

Alokasi anggaran Rp. 4.362.120.883 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. dengan persentase 88,6% dan pagu anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 3.865.000.735

7. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun 2023, Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM bertujuan untuk menunjang dari pada pencapaian perjanjian kinerja Kepala OPD seperti pada sajian tabel berikut;

Tabel 3.7 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Anggaran dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023		Sasaran Strategis PK 2023	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian Target	Keterangan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	500.000.000	48.000.000	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Sehat	Presentase Koperasi Aktif	71,00%	73,00%	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000	48.000.000					

	Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	500.000.000	48.000.000					
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	94.023.002	89.535.400					
	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	94.023.002	89.535.400	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,99	-9%	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	94.023.002	89.535.400					
3	Program Pengembangan UMKM	4.218.097.881	3.727.465.335	Meningkatnya Pertumbuhan	Pertumbuhan UMKM	5%	23%	Capaian kinerja menjadi

	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.218.097.88 1	3.727.465.33 5	uhan UMKM				minus dikarena kan terjadiny a perubaha n dalam klasifikasi UMKM yang didata yaitu UMKM yang memiliki NIB
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi	4.218.097.88 1	3.727.465.33 5					
4	Program Pengembangan Ekspor	934.948.065	924.402.186					
	Penyelenggaraa n Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	934.948.065	924.402.186	Meningk atnya nilai ekspor bersih Kaltara	Pertumb uhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	2,10%	- 13,30%	
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	396.697.046	391.526.078					
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	116.949.708	114.799.572					
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	85.288.675	82.694.193					
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	336.012.636	335.382.343					
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	18.920.799.5 62	17.682.968.8 45	Terwujud nya stabilisas i harga dan	Presenta si inflasi pangan bergejola k	3 ± 1		

	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	18.920.799.562	17.682.968.845	ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Industri	18.920.799.562	17.682.968.845					
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	2.572.617.728	2.446.438.482					
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	149.999.646	129.634.100					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	74.999.823	69.859.550	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	74.999.823	59.774.550					

	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2.372.628.08₂	2.270.097.58₂				
	Pemantauan Harga dan Stok	170.000.000	142.013.000				
	Barang Kebutuhan Pokok dan						
	Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.202.628.08 ₂	2.128.084.58 ₂				
	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya	49.990.000	46.706.800				

	Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	49.990.000	46.706.800					
7	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	352.955.000	350.830.000					
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	352.955.000	350.830.000	Meningk atnya perlindun gan konsume n dan pengawa san perdagangan	Presenta se Barang yang Tidak Sesuai Standar	6%	7%	
	Peningkatan kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/Atau Jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	352.955.000	350.830.000					
8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	452.362.212	386.212.366					
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	452.362.212	386.212.366	Meningk atnya Pasar Produk Lokal	Persenta se peningka tan Kontribus i Sub Sektor pedagan gan Produk Lokal terhadap PDRB	15%		
	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	452.362.212	386.212.366					
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.549.400.74 2	2.575.269.70 3					
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.549.400.74 2		Meningk atnya pertumbu han PDRB Sektor Industri	Persenta se peningka tan kontribusi sektor industri	14,41%	-0,13%	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	138.552.052						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.510.681.078						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta masyarakat	759.613.540						
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	140.554.072						
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.890.000	137.283.667					
	Penyediaan Informasi untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150.890.000	90.161.136					

	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	95.740.000	47.122.531					
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	55.150.000	40.795.063.087					

BAB IV

PENUTUP

i. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lakip Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dikategorikan cukup berhasil, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan kerja keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks. Namun sebagian Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Dengan laporan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi kinerja, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat terukur dan tepat sasaran dalam sebuah pelaksanaan Program dan Kegiatan.

ii. Hasil Analisis Hambatan dari Bab III Sasaran

Hasil analisis hambatan yang disajikan pada Bab III akan disajikan kembali dalam tabel berikut;

Tabel 4.1 Analisis Hambatan

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan koperasi sehat	Pertumbuhan koperasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dalam pengelolaan koperasi, Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementrian Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat	Melakukan pengawasan kepada koperasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus dan anggota koperasi
	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Masih terdapat UMKM yang belum mengetahui proses untuk mengakses KUR yang ada diperbankan, tidak semua pelaku UMKM paham teknologi sehingga kegiatan sosialisasi secara daring cukup menyulitkan dan informasi melalui media social tidak dapat diakses secara maksimal untuk UMKM yang	Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait dengan adanya KUR yang dapat diakses sebagai penguat permodalan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan mengoptimalkan peran dari pendamping UMKM yang ada di Kabupaten dan Kota.

		mengakses KUR mengalami penurunan sebesar 1.569	
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Adanya perbedaan pendataan terkait dengan kategori usaha mikro yang menyebabkan perubahan data dan perlunya melakukan pendataan ulang sesuai dengan klasifikasi yang telah disepakati oleh kementerian Koperasi dan UMKM	Dinas perindagkop telah melakukan upaya memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM dan melakukan perbaikan data pada UMKM
2	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Masih banyak Komoditi ekspor kaltara yang berbentuk mentah dan belum berbentuk produk siap pakai, dan belum terbukanya akses pasar internasional bagi pelaku UKM maupun IKM dikarenakan barang yang belum memenuhi standarisasi ekspor pada Negara tujuan.	Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai, dan melakukan peningkatan citra produk UKM dan IKM agar dapat memenuhi standar ekspor negara tujuan.
3	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Masih terdapat ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bahan Pokok di Kalimantan Utara terutama saat menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional Dikarenakan barang kebutuhan pokok di Kalimantan Utara masih dikirimkan dari luar Provinsi Kalimantan Utara.	Mengadakan kegiatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok dan melakukan operasi pasar murah untuk meminimalisir kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok terutama menjelang pelaksanaan perayaan Hari besar keagamaan nasional

	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Masih didapati pelaku usaha yang menjual produk dari luar negeri tanpa syarat dan ketentuan jaminan mutu produk negara Indonesia	Melakukan pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur seperti kepolisian dan TNI untuk mencegah peredaran produk ilegal dari luar negeri
	Meningkatnya pasar produk lokal	Masih terdapat produk yang kalah bersaing dengan produk luar Provinsi Kalimantan Utara hal ini dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM masih belum memenuhi standar jual seperti kemasan produk dan jaminan keamanan produk seperti label BPOM, label halal sehingga sulit untuk dipasarkan dan menarik minat konsumen. Dan masih kurangnya promosi dan kesempatan kepada pelaku UMKM yang memiliki produk yang telah memenuhi syarat ketentuan jual.	Melakukan Sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk dapat membantu menjual produk lokal yang telah memenuhi standar ketentuan jual
4	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Belum Optimalnya pengaplikasian rencana dokumen pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/kota, serta belum maksimalnya pengembangan hilirisasi industri berbahan dasar lokal	Melakukan review atas dokumen perencanaan pembangunan industri serta melakukan peningkatan kapasitas kepada pelaku Industri kecil dalam kualitas produk dan produksi produk.

iii. **Langkah-langkah Yang Akan Dilakukan Di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan**

Untuk Mengatasi Hambatan yang terjadi ditahun selanjutnya maka akan dilakukan langkah-langkah berupa :

Tabel 4.2 Rencana Penanganan Hambatan

No	Sasaran Strategis	Hambatan	Upaya yang dilakukan
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan koperasi sehat	Pertumbuhan koperasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan peningkatan kulalitas dalam pengelolaan koperasi, Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan RAT, belum memiliki NIK dan Sertifikat NIK dari Kementriaan Koperasi dan UKM dan terdapat koperasi yang belum memenuhi aspek organisasi, aspek usaha, aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sumber daya manusia sehingga belum memenuhi kategori koperasi sehat	Melakukan pengawasan kepada koperasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus dan anggota koperasi
	Meningkatnya UMKM yang mengakses	Masih terdapat UMKM yang belum mengetahui proses untuk mengakses	Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi kepada UMKM terkait dengan adanya KUR

	KUR	KUR yang ada diperbankan, tidak semua pelaku UMKM paham teknologi sehingga kegiatan sosialisasi secara daring cukup menyulitkan dan informasi melalui media sosial tidak dapat diakses secara maksimal untuk UMKM yang mengakses KUR mengalami penurunan sebesar 1.569	yang dapat diakses sebagai penguat permodalan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan mengoptimalkan peran dari pendamping UMKM yang ada di Kabupaten dan Kota.
	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Adanya perbedaan pendataan terkait dengan kategori usaha mikro yang menyebabkan perubahan data dan perlunya melakukan pendataan ulang sesuai dengan klasifikasi yang telah disepakati oleh Kementerian Koperasi dan UMKM	Dinas perindagkop telah melakukan upaya memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM dan melakukan perbaikan data pada UMKM
2	Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara	Masih banyak komoditi ekspor Kaltara yang berbentuk mentah dan belum berbentuk produk siap pakai, dan belum terbukanya akses pasar internasional bagi pelaku UKM maupun IKM dikarenakan barang yang belum memenuhi standarisasi ekspor pada Negara tujuan.	Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendorong produk-produk UMKM agar produk UMKM yang telah ada dapat langsung menjadi produk siap pakai, dan melakukan peningkatan citra produk UKM dan IKM agar dapat memenuhi standar ekspor negara tujuan.

3	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Masih terdapat ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bahan Pokok di Kalimantan Utara terutama saat menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional Dikarenakan barang kebutuhan pokok di Kalimantan Utara masih dikirimkan dari luar Provinsi Kalimantan Utara.	Mengadakan kegiatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok dan melakukan operasi pasar murah untuk meminimalisir kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok terutama menjelang pelaksanaan perayaan Hari besar keagamaan nasional
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Masih didapati pelaku usaha yang menjual produk dari luar negeri tanpa syarat dan ketentuan jaminan mutu produk negara Indonesia	Melakukan pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur seperti kepolisian dan TNI untuk mencegah peredaran produk ilegal dari luar negeri
	Meningkatnya pasar produk lokal	Masih terdapat produk yang kalah bersaing dengan produk luar Provinsi Kalimantan Utara hal ini dikarenakan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM masih belum memenuhi standar jual seperti kemasan produk dan jaminan keamanan produk seperti label BPOM, label halal sehingga sulit untuk dipasarkan dan menarik minat konsumen. Dan masih kurangnya promosi dan kesempatan kepada pelaku UMKM yang memiliki produk yang telah memenuhi syarat	Melakukan Sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk dapat membantu menjual produk lokal yang telah memenuhi standar ketentuan jual

		ketentuan jual.	
4	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Belum Optimalnya pengaplikasian rencana dokumen pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/kota, serta belum maksimalnya pengembangan hilirisasi industri berbahan dasar lokal	Melakukan review atas dokumen perencanaan pembangunan industri serta melakukan peningkatan kapastias kepada pelaku Industri kecil dalam kualitas produk dan produksi produk.

iv. Pengungkapan Renstra Baru Dengan Menyusun Perjanjian Kinerja Baru Yang Sesuai Dengan Renstra

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dengan itu pula telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan indikator dan target sasaran yang lebih relevan dan dapat diukur;

Tabel 4.3 Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Renstra

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGIS PK 2023	INDIKATOR KINERJA PK 2023	TARGET PK 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Persentase Koperasi Aktif	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Persentase Koperasi Aktif	71%
		Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1,99 %
		Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	5%
2	Meningkatkan Neraca Perdagangan Ekspor Kalimantan Utara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	2,1 %
3	Meningkatkan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah	Persentase Inflasi Pangan Begejolak	3 ± 1

		Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	6 %
		Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	Meningkatnya Pasar Produk Lokal	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	15 %
4	Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	14,41 %

Kepala Dinas,



Hj. Hasriyani, SH, MM
Pembina TK. I. IV/b

NIP. 197307172003122008